

## Lampiran 1

**Lampiran data-data hasil wawancara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Anies Baswedan. Wawancara dilakukan via E-mail pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, pada pukul 14:21 WIB.**

### 1. Apa saja akses layanan pendidikan di Indonesia?

Dalam pendidikan, kita memiliki standar pelayanan minimal (SPM). Sudah ada, tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N0. 23/2013. Dalam peraturan itu tercantum secara rinci apa saja yang menjadi standar pelayanan minimal sekolah kita.

Untuk memperluas akses layanan pendidikan, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen menerbitkan Kartu Indonesia Pintar untuk membantu anak bangsa bisa bersekolah sampai 12 tahun. Dengan KIP itu, bukan hanya anak-anak miskin yang masih bersekolah yang terbantu, tapi juga mereka yang terpaksa keluar dari sekolah. Dengan menggunakan KIP, mereka yang disebut terakhir ini bisa bersekolah kembali. KIP ini bisa digunakan dalam jalur formal, yaitu sekolah, bisa juga digunakan dalam jalur non-formal, yaitu kursus, workshop, dan lainnya. Syaratnya adalah anak yang masuk dalam kategori usia sekolah.

Pada tahun 2015, Kemendikbud mendapatkan jatah untuk membagikan KIP kepada sebanyak 17 juta anak. Namun, karena dananya masih ada, saya meminta agar jumlah siswanya ditambah. Pada 2015 Kemendikbud bisa memberikan KIP sampai kepada 18 juta lebih anak, melebihi target pemerintah. Pada tahun ini, proses pembagian KIP pada Mei sudah 93%. Sisanya terus berjalan, sampai sekarang.

Nah, upaya ini dijalankan demi memperlebar kesempatan bagi anak-anak kita dalam mendapatkan pendidikan.

2. Apa yang dimaksud dengan kebijakan pendekatan program (*programmatic*)?

Secara sederhana, saya membagi dua pendekatan dalam soal gerakan sosial, yaitu program dan gerakan. Kedua pendekatan ini bukan dalam artian ketat, harus memiliki sejumlah syarat atau harus memenuhi berbagai kondisi. Ini kategori sederhana saja.

Pendekatan program berarti, sebuah program yang dimunculkan dari tingkat pengambil keputusan dan bukan berdasarkan kebutuhan di tingkat bawah. Misalnya, jika sebuah lembaga memutuskan untuk menjalankan program A, maka semua masyarakat tanpa kecuali diminta mengikuti program tersebut tanpa banyak bertanya.

Model pendekatan macam ini banyak sekali terjadi pada zaman pemerintahan Orde Baru. Seakan pemerintah lebih mengetahui resep yang lebih baik bagi masyarakat. Padahal belum tentu demikian. Yang juga penting adalah rasa kepemilikan masyarakat atas sebuah program itu kurang, untuk tak dibilang tak ada sama sekali.

Model pendekatan program ini jika diterapkan pada masa sekarang tentu sudah tidak cocok. Model kepemimpinan yang mestinya kita terapkan saat ini adalah pendekatan gerakan.

3. Apa yang dimaksud dengan kebijakan pendekatan gerakan (*movement*)?

Pendekatan ini bermakna mengajak semua masyarakat untuk terlibat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. Misalnya, masyarakat menghadapi masalah banjir yang diakibatkan selokan mampet, maka pemerintah berada di garis depan untuk mengajak semuanya untuk mau membersihkan selokan tersebut. Dalam proses mengajak itu, pemimpin memberikan contoh, memberikan teladan. Keteladanan pemimpin menjadi kunci dalam pendekatan ini.

3. Apa keunggulan dan kekurangan antara kebijakan pendekatan program dengan kebijakan pendekatan gerakan?

Keunggulan utama dalam pendekatan gerakan adalah rasa memiliki. Karena setiap orang yang bergerak mengetahui dengan pasti bahwa tujuan gerakan itu bukan hanya kembali kepada orang lain, tapi juga kepada dirinya sendiri. Selain itu, dalam pendekatan ini setiap orang diberikan kesempatan untuk memberikan manfaat terbaik mereka bagi banyak orang lain.

4. Bagaimana hasil dari kebijakan pendekatan program dengan kebijakan pendekatan gerakan bagi tersedianya akses layanan pendidikan di Indonesia?

Mengenai hasil, banyak yang sudah bisa kita lihat saat ini. Misalnya mengenai kampanye pentingnya sekolah dan makin banyaknya masyarakat kelas menengah yang mau berbagi waktu dan inspirasi kepada masyarakat banyak tentang pendidikan. Para pendaftar Indonesia Mengajar terus membludak, peserta

Kelas Inspirasi tak pernah kekurangan. Juga gerakan pendidikan lainnya, seperti yang digelar Dompot Dhuafa, dan lainnya.

Ini menunjukkan betapa pendekatan gerakan bagi tersedianya akses layanan pendidikan Indonesia sudah menunjukkan hasil yang sangat lumayan. Insya Allah perkembangannya terus membaik, dan pada gilirannya semua ini akan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Insya Allah.

5. Bagaimana perbandingan efektifitas antara kebijakan pendekatan program dengan kebijakan pendekatan gerakan dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia?

Tentu saja pendekatan gerakan lebih efektif. Misalnya, kita ingin meningkatkan kualitas guru kita. Kita lalu melihat bahwa ada sebuah cara untuk kita bisa meningkatkan kualitas guru di satu sisi dan menjadikan ini sebagai gerakan bersama, yaitu melalui gerakan terima kasih guru. Alhamdulillah, banyak pihak yang menyambut gerakan ini. Garuda, misalnya, membuka program sejuta *mileage* kepada guru dan memberikan ruang *chek in* khusus kepada guru. Dengan *mileage* yang diberikan oleh para penumpang Garuda, banyak guru kita yang bisa terbang menggunakan Garuda untuk mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari workshop sampai konferensi di luar negeri.

Model Garuda ini menjadi bukti konkret betapa mereka merasa memiliki masalah, dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang paling penting, mereka melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah masalah kita bersama.

Yang juga penting dicatat adalah kita melihat perhelatan bulan pendidikan dan kebudayaan pada tahun ini. Jika kita biasanya menyelenggarakan Hari Pendidikan Nasional hanya dalam hitungan satu-dua hari, maka pada tahun ini kita menjadikan Mei sebagai Bulan Pendidikan dan Kebudayaan. Masyarakat di penjuru negeri ini berpesta untuk merayakan Mei sebagai bulan pendidikan dan kebudayaan.

Ini tentu hanya sebagaian kecil dari contoh betapa efektifnya pendekatan gerakan bagi dunia pendidikan. yang mesti kita lakukan saat ini adalah memperluas jangkauannya. Nah, ini menjadi PR bersama kita.

**Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N0. 23/2013.**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di seluruh kabupaten/kota, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :
    1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
    2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
    3. setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
    4. setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
    5. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
    6. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
    7. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
    8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
    9. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
    10. setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
    11. setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
    12. setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;



13. pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :

1. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
2. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
3. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
  - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
  - b) Kelas III : 24 jam per minggu;
  - c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
  - d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
7. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
8. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan

rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan

13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan satu ayat menjadi ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) SPM pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.
- (3) Target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada akhir tahun 2014.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

Standar Pelayanan Minimal untuk Petunjuk Umum, Perhitungan Indikator Pencapaian, dan Analisis Standar Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan semester I merupakan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat bulan Juni, yang memuat kondisi aktual perkembangan penerapan SPM Pendidikan Dasar terutama dalam hal melaksanakan sosialisasi, perhitungan anggaran, dan penerapan SPM dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah; dan
  - b. Laporan semester II merupakan hasil monitoring dan evaluasi semester I dan kinerja penerapan dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar satu tahun, disampaikan paling lambat akhir Desember.
- (3) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Pendidikan Dasar.

5. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 464

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H  
NIP 195809151985031001